

MODUL

1

HUKUM PERKAWINAN

Bagi Umat Islam di Indonesia



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
**Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal
(PP-PNFI) Regional I Bandung**
2012

Modul 1

Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia

Penulis:

Najib Anwar, Drs.,MH

Edit dan Layout:

Emul Mulyana, M.Pd

Rr. Erna Hernawati, Dra.,M.M.Pd

Desain Cover:

Edi Suswantoro

Kontributor:

BP4 Pusat Jakarta, Universitas Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, UPTD P3-PNFI Jakarta, UPTD SKB Kota Depok, UPTD SKB Kab Bandung Barat, KUA Kab Bandung Barat, BPPKB Kab Bandung Barat, Dinas Kesehatan Kab Bandung Barat, Kementerian Agama Kab Bandung Barat, Puskesmas Kecamatan Lembang, LKP Yuyu, PKBM Bina Terampil Mandiri, PKBM Bina Mandiri Cipageran, PKBM Geger Sunten, PKBM Kinanti, Tim Pengembang PP PNFI Regional I Bandung



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Bandung

Tahun 2012

Kata Pengantar



Pendidikan yang pertama dan utama diperoleh anak adalah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang paling bertanggungjawab dalam mendidik anak-anaknya. Peran orangtua sangat besar dalam membantu anak-anaknya tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh sebab itu, penting adanya pendidikan yang memberi bekal bagi para calon pengantin yang pada gilirannya akan menjadi orangtua bagi anak-anaknya. Pendidikan tersebut diberikan bagi remaja usia pra perkawinan agar memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hukum perkawinan, kesehatan, keorngtuaan, dan lain-lain, dengan harapan mereka siap menjelang pernikahan.

Salah satu upaya dalam mewujudkan hal tersebut, PP PNFI Regional I Bandung pada tahun 2012 melaksanakan pengembangan model pendidikan keluarga responsive anak usia dini bagi remaja usia pra perkawinan. Model tersebut bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan bagi orang dewasa dan pasangan yang akan menikah. Sebagai bahan ajar dalam model ini, disusun enam modul, yaitu:

Modul 1 : Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia.

Modul 2 : Persiapan Mental dan Spiritual Menjelang Pernikahan.

Modul 3 : Pendidikan Kesehatan Calon Pengantin.

Modul 4 : Pendidikan Pra Perkawinan Dalam Keluarga.

Modul 5 : Pendidikan Keorngtuaan.

Modul 6 : Pengelolaan Keuangan Keluarga

Kami menyadari bahan ini dimungkinkan masih terdapat kekurangan baik isi maupun bentuk sajiannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran untuk kesempurnaan modul tersebut. Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk mewujudkan model ini. Semoga karya ini bermanfaat. Amin.

Bandung, Desember 2012
Kepala PP PNFI Regional I Bandung

Ir. Djajeng Baskoro, M.Pd
NIP. 196306251990021001

Daftar Isi



Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. Pendahuluan	1
A. Latar belakang	1
B. Deskripsi	1
C. Kompetensi	2
D. Petunjuk penggunaan modul	2
BAB II. Kegiatan Belajar 1	4
A. Tujuan belajar	4
B. Materi	4
C. Rangkuman	6
D. Evaluasi	7
BAB III. Kegiatan Belajar 2	8
A. Tujuan belajar	8
B. Materi	8
C. Rangkuman	11
D. Evaluasi	12
BAB IV. Kegiatan Belajar 3	13
A. Tujuan belajar	13
B. Materi	13
C. Rangkuman	38
D. Evaluasi	39

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keharmonisan hubungan suami istri merupakan faktor penentu bagi keharmonisan masyarakat. Jika kehidupan suami istri tidak tentram, maka masyarakat-pun menjadi tidak tentram. Kasus perselisihan, perceraian serta kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi di masyarakat, salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan berkeluarga.

Untuk mengurangi terjadinya kasus tersebut dan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*, maka perlu dilakukan pendidikan pra-perkawinan sebagai bekal bagi mereka untuk membangun keluarga.

B. Deskripsi

1. Pendidikan pra-perkawinan merupakan aktivitas pemberian pengetahuan, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah calon pengantin mengenai dinamika kehidupan berumahtangga.
2. Calon pengantin adalah laki-laki dan perempuan yang akan menikah dan telah menyampaikan kehendak untuk menikah pada Kantor Urusan Agama (KUA).
3. Remaja usia nikah adalah laki-laki dan perempuan yang menurut usia sudah matang untuk melaksanakan

pernikahan. Usia laki-laki sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan usia perempuan sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Melalui aktivitas pendidikan pra-perkawinan, mereka yang menjadi peserta didik mempunyai kesiapan untuk memasuki kehidupan berumahtangga, baik secara spiritual maupun material. Karenanya, melalui modul ini peserta akan dibekali materi tentang: 1) pengertian perkawinan, 2) tujuan dan hikmah perkawinan, 3) syarat dan rukun perkawinan, 4) sahnya perkawinan, 6) azas perkawinan, 7) hak dan kewajiban dalam keluarga, dan 8) hukum perceraian.

C. Kompetensi

Peserta diharapkan mampu memahami pengertian perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, sahnya perkawinan, asas perkawinan, hak dan kewajiban dalam keluarga, serta hukum perceraian.

D. Petunjuk Penggunaan

1. Bacalah modul ini secara sistematis, artinya dibaca mulai bagian awal terlebih dahulu kemudian dilanjutkan kebagian selanjutnya.
2. Kerjakan tugas dan latihan modul ini sesuai dengan arahan fasilitator saat memberikan materi.
3. Kerjakan secara mandiri setiap latihan yang terdapat pada masing-masing bagian.

4. Rencanakan waktu untuk memepelajarinya secara bertahap. Tiap bagian membutuhkan waktu yang berbeda sesuai kecepatan belajar masing-masing.
5. Setelah memepelajarinya, buatlah suatu peta pikiran secara verbal dan visual sehingga dapat memahaminya dengan baik.
6. Agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal, bacalah referensi yang relevan.

KEGIATAN BELAJAR 1

A. Tujuan Belajar

Peserta dapat memahami pengertian, tujuan dan hikmah perkawinan.

B. Materi

1. Pengertian perkawinan

Pengertian perkawinan sebagaimana disebutkan Pasal 1 Bab I UU Perkawinan, ialah: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Sementara hukum Islam dari perkawinan dicantumkan dalam Pasal 2 Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI): Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah S.W.T dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Mayoritas ulama (jumhur) termasuk Imam Syafi'i, menyebutkan bahwa hukum perkawinan dalam Islam adalah *sunnah*. Berbeda dengan jumhur ulama, Al Zhahiri menyebut hukum asal perkawinan adalah wajib.

Dengan demikian, dapat dicermati bahwa hukum perkawinan dalam Islam berbeda-beda sesuai dengan

alasannya. Karena itu, para ulama mengelompokan hukum perkawinan menjadi 5 (lima), yaitu:

- a. Wajib, bagi seseorang yang sudah cukup umur, mempunyai kemampuan memberi nafkah, dan khawatir tidak mampu menahan nafsu atau takut terjerumus ke dalam perzinaan;
- b. Sunnah, bagi orang yang mempunyai kemampuan memberi nafkah dan berkeinginan melangsungkan perkawinan, meskipun mampu menahan nafsu dan tidak takut akan terjerumus ke dalam perzinaan;
- c. Haram, bagi orang yang mempunyai maksud menyakiti hati suami/ istri dan menyia-nyiakannya;
- d. Mubah, yaitu bagi orang yang belum mampu memberi nafkah, sementara dirinya tidak mampu menahan nafsu dan khawatir terjatuh pada perbuatan zina. Bila seseorang sudah mampu memberi nafkah, maka hendaknya segera melakukannya;
- e. Makruh, bagi orang yang belum sanggup memberikan nafkah, sementara dia masih mampu menahan nafsu yang mengarah pada perbuatan zina.

2. Tujuan dan hikmah perkawinan

Tujuan perkawinan yang termaktub dalam Pasal 1 UU Perkawinan, yaitu: “....membentuk keluarga yang bahagia dan kekal....” Sementara tujuan perkawinan menurut hukum Islam secara tegas diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Hikmah perkawinan dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu bagi kedua mempelai dan bagi masyarakat. Hikmah perkawinan bagi kedua mempelai, antara lain:

- a. Jiwa menjadi lebih tenang, karena terjalinnya rasa cinta dan kasih sayang, serta kehidupan lebih terarah;
- b. Terhindar dari perbuatan maksiat;
- c. Menjaga kelangsungan hidup manusia sesuai dengan ajaran agama;

Sementara hikmah perkawinan bagi kehidupan bermasyarakat, antara lain:

- a. Ketenangan dan ketentraman anggota masyarakat, karena terhindar dari perbuatan maksiat;
- b. Meringankan beban masyarakat dalam pembangunan;
- c. Memperkokoh hubungan tali persaudaraan dalam masyarakat dengan rasa cinta dan kasih sayang.

C. Rangkuman

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Bab I, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 adalah: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhon* untuk

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan termaktub di dalam Pasal 1 UU Perkawinan, yaitu: “....membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal....”.

Sementara tujuan perkawinan menurut hukum Islam secara tegas diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI): Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Adapun hikmah perkawinan dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu bagi kedua mempelai dan bagi masyarakat.

D. Evaluasi

1. Perkawinan menurut UU Nomor 1 tahun 1974, adalah ...
2. Pengerian [perkawinan menurut hukum Islam, adalah ...
3. 5 (lima) hukum perkawinan menurut Islam, adalah ...
4. Tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 tahun 1974, adalah ...
5. Tujuan perkawinan menurut hukum Islam yang termaktub dalam Pasal 3 KHI, adalah ...

KEGIATAN BELAJAR 2

A. Tujuan Belajar

Peserta dapat memahami dan menjelaskan syarat perkawinan, sah-nya perkawinan dan asas perkawinan.

B. Materi

1. Syarat dan rukun perkawinan

Syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan:

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1);
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2);
- c. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun (Pasal 7) atau dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita (Pasal 6 ayat 2 dan 3);
- d. Perkawinan dilarang, bagi 2 (dua) orang yang:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang

dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

- 3) Berhubungan se-benda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ bapak tiri;
- 4) Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/ paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin (Pasal 8)

Sementara menurut hukum Islam, rukun perkawinan yang diatur dalam KHI, harus ada:

- a. Calon mempelai sesuai dengan Pasal 7 UU Perkawinan, suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun. Kalau calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin baik orangtua atau wali (Pasal 15). Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai dengan pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas (Pasal 16);
- b. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita dan bertindak untuk menikahkannya (Pasal 19). Orang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil

baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim (Pasal 20);

- c. Dua orang saksi yang dapat ditunjuk dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli (Pasal 25);
- d. Ijab dan Kabul. Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu (Pasal 27) dan yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi (Pasal 28).

2. Sahnya perkawinan

Sahnya perkawinan menurut Pasal 2 UU Perkawinan, yaitu:

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, jelas bahwa sahnya perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan, serta harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan harus dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah dan bila di luar, mereka tidak mempunyai kekuatan hukum.

3. Asas dalam perkawinan

Perkawinan berasaskan monogami, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat 1 dan UU Perkawinan. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Secara jelas tercantum pada Penjelasan Pasal 3 UU Perkawinan.

Apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, maka pengadilan dapat memberikan izin untuk poligami sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat 2, 4 dan 5 UU Perkawinan. Dikatakan bahwa “izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” (Pasal 3 ayat 2) dan akan diizinkan oleh pengadilan (khususnya pengadilan agama) (Pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan dan Pasal 57 KHI), apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal ini kurang memberikan perlindungan bagi perempuan, karena kesalahan lebih ditujukan kepada perempuan, sekalipun Pasal 5 UU Perkawinan dan Pasal 58 KHI mengatur pengajuan permohonan ke pengadilan harus memenuhi syarat-syarat:
 - 1) Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri;
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak;
 - 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

C. Rangkuman

Syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan, antara lain: 1) didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, 2) seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orangtua, 3) hanya diizinkan bila

pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun, atau dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orangtua pihak pria atau pihak wanita.

Selanjutnya, menurut hukum Islam rukun perkawinan harus ada: 1) aali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh, 2) dua orang saksi ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, 3) ijab kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu dan yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.

Sementara itu, sahnya perkawinan: 1) dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan 2) dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya sahnya perkawinan menurut hukum Islam, apabila: 1) dilakukan menurut hukum Islam, 2) berasaskan monogami, dan 3) dasarnya pria hanya boleh memiliki seorang istri dan wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

D. Evaluasi

1. 1 dari 3 (tiga) syarat perkawinan menurut UU Perkawinan, adalah ...
2. Rukun perkawinan menurut hukum Islam yang tercantum dalam pasal 14 – 28 KHI, adalah ...
3. Syahnya perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana termaktub dalam pasal 4 KHI, adalah ...
4. Asas perkawinan dalam pasal 3 UU Perkawinan, adalah ...

Kegiatan Belajar 3

A. Tujuan Belajar

Peserta dapat memahami hak dan kewajiban, dan tentang perceraian.

B. Materi

1. Hak dan Kewajiban

a. Hak dan kewajiban suami-istri

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30).
- 2) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat (Pasal 31).
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31).
- 4) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31).
- 5) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap (Pasal 32)

- 6) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia memberi bantuan lahir dan batin satu sama lain (Pasal 33).
- 7) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34).
- 8) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya (Pasal 34).
- 9) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan (Pasal 34).

Sementara khusus untuk warga negara yang beragama Islam, diatur hak dan kewajiban suami istri tercantum dalam Pasal 77 dan 78 KHI:

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik secara jasmani, rohani, kecerdasan dan pendidikan agamanya;
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
- 5) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap yang ditentukan oleh suami istri.

b. Kedudukan suami istri yang diatur dalam Pasal 79 KHI

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Sementara itu, kewajiban suami sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KHI, antara lain

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai urusan yang penting diputuskan oleh suami istri;
- 2) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 3) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan anak.

c. Kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang diatur dalam Pasal 82 KHI

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang

ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

- 2) Dalam hal para istri harus rela dan ikhlas, serta suami dapat menempatkan istri-istrinya dalam satu tempat kediaman.

d. Kewajiban istri diatur dalam Pasal 83 KHI

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

e. Harta benda dalam perkawinan, antara lain:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan (Pasal 35).
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan di bawah penguasaan masing-masing si penerima (Pasal 35).
- 3) Harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36)
- 4) Harta bawaan masing-masing, mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36)
- 5) Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37)

f. Hak dan kewajiban orangtua terhadap anak (KHI)

- 1) Pada anak yang sah dan anak yang lahir diluar perkawinan. Anak yang sah, antara lain:
 - Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
 - Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut (Pasal 99).
- 2) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah (Pasal 103).
- 3) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah atau walinya. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya (Pasal 104).
- 4) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Pasal 98 ayat 1).
- 5) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 98).

- 6) Pengadilan agama dapat menunjuk seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut, apabila kedua orang tuanya tidak mampu (Pasal 98).

Pengaturan tentang perlindungan anak di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu yang dimaksud dengan perlindungan adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak, serta pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, supaya dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 Angka 2 UU Perlindungan Anak).

Hak anak diatur dalam Pasal 4–19 UU Perlindungan Anak, antara lain berhak:

- 1) Hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
- 2) Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
- 3) Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (Pasal 6);
- 4) Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan di asuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin

tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 7);

- 5) Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8);
- 6) Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan, sesuai dengan minat dan bakatnya. Bagi anak penyandang cacat, berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Bagi anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9);
- 7) Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya (Pasal 10);
- 8) Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11);
- 9) Anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12);
- 10) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan,

dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;

- 11) Untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- 12) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);
- 13) Memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16);
- 14) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2);
- 15) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16);
- 16) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17);

- 17) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17);
- 18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

g. Kewajiban anak diatur dalam Pasal 19 UU PA

Setiap anak berkewajiban untuk:

- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Anak yang membutuhkan perlindungan khusus, adalah anak:

- 1) Dalam situasi darurat;
- 2) Sedang berhadapan dengan hukum;
- 3) Berasal dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- 4) Tereksplorasi secara ekonomi dan/ atau seksual;
- 5) Diperdagangkan;
- 6) Korban penyalahgunaan Narkoba;
- 7) Korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
- 8) Korban kekerasan fisik dan/atau mental;
- 9) Berkebutuhan khusus, dan;
- 10) Korban perlakuan salah dan penelantaran.

Adapun kewajiban orang tua terhadap anak yang utama menurut Islam ada 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) Memberi nama yang baik. Alangkah baiknya jika nama tersebut mengandung doa orang tua terhadap anaknya. Seperti Abdurrahman dan Abdullah;
- 2) Mengajarkan ajaran agama, terutama yang berasal dari *al-qur'an* dan hadist. Karena, ketaatan kepada Allah dan Rasulullah hanya diajarkan melalui *al-qur'an* dan *hadist* yang akhirnya berbuah menjadi ketaatan kepada orang tuanya;
- 3) Kewajiban besar terakhir orang tua kepada anak adalah menikahkannya dengan pasangan yang shaleh. Adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pertimbangan yang utuh tentang pasangan dari berbagai aspeknya (aspek agama, fisik, materi, sosial) agar pasangan terbaik untuk anak.

Adapun hak orang tua sebagaimana dijelaskan dalam kitab *durat al-nasihin* dalam majelis ke-13 tentang *fadhilah birr alwalidain* ada 10 (sepuluh) hak orangtua yang wajib dilakukan anak:

- 1) Memberi makan, jika mereka memerlukan;
- 2) Memberi pelayanan, jika mereka memerlukan;
- 3) Memenuhi panggilannya, jika mereka memanggil;
- 4) Mentaati perintahnya, kecuali jika disuruh maksiat;
- 5) Memberi pakaian, jika mereka perlu dan anak dalam keadaan mampu;
- 6) Berjalan di belakangnya, bukan mendahuluinya;
- 7) Mencari keridhaannya dengan cara yang diridhoinya;

- 8) Menghindari hal-hal yang dibencinya;
- 9) Memohon ampun bagi mereka dalam setiap doa.

Selanjutnya beberapa tata krama yang mesti diperhatikan oleh anak muslim terhadap orang tuanya, antara lain:

- 1) Jangan memanggil namanya, tapi panggilah dengan panggilan yang mereka sukai;
- 2) Jangan berjalan mendahului mereka;
- 3) Penuhi panggilan mereka dengan senang hati;
- 4) Berbicaralah dengan lemah lembut;
- 5) Layani jika mereka memerlukan;
- 6) Turuti semua perintahnya yang baik;
- 7) Biarkan mereka lebih dahulu makan dan minum;
- 8) Lupakan kesalahan dan kelalaian mereka;
- 9) Perlakukan mereka dengan penuh rasa hormat;
- 10) Jangan sombong dan congkak kepada mereka.

2. Perceraian

Pada dasarnya putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan diatur dalam Pasal 38 UU Perkawinan. Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 UU Perkawinan, yaitu:

a. Pasal 39

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundangan yang berlaku.

b. Pasal 40

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat 1 diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Sementara di dalam hukum perkawinan Islam, pengaturan tentang talak dan cerai diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 adalah kewenangan peradilan agama. Namun sekarang sudah beralih ke Mahkamah Agung (MA)

Pada dasarnya perceraian itu dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. **Talak**, dapat dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 KHI;
- b. **Gugat cerai**, diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama di wilayah tempat tinggal penggugat, kalau tergugat bertempat tinggal di luar negeri, diatur dalam Pasal 132 KHI.

Perceraian dapat terjadi karena alasan yang diatur dalam Pasal 116 KHI, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan hal lain yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus terjadi perselisihan/ pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun kembali;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad.

Sebelum gugatan cerai dikabulkan oleh pengadilan agama, maka pada prinsipnya (KHI:

- a. Hakim harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 143);
- b. Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian (Pasal 144);

- c. Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan dilakukan dalam sidang tertutup, tetapi putusannya dilakukan dalam sidang terbuka (Pasal 145).

3. Akibat perceraian

Pertama, akibat perceraian terhadap hubungan suami istri, sebagaimana tertuang dalam Pasal 149–152 KHI. Perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
- e. Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam *iddah*;
- f. Bekas istri selama dalam *iddah*, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain;
- g. Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.

Kedua, akibat perceraian terhadap anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 KHI, ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan

kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan yang harus memberi keputusan;

- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Ketiga, akibat perceraian terhadap harta benda. Pada saat perceraian, maka harta pada dasarnya harta bersama dapat dibagi, masing-masing mendapat seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tertuang dalam Pasal 97 KHI. Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

4. Prinsip-prinsip perkawinan dalam hukum Islam

a. *Kafa'ah*

Menurut bahasa, kafa'ah berarti serupa, seimbang atau serasi. Menurut istilah adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami, baik dalam kedudukan, status sosial, akhlak, maupun kekayaannya, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.

Keseimbangan keberadaan antara suami dan istri akan lebih menjamin keharmonisan dan kesuksesan

hidup, serta dapat menghindarkan diri dari keretakan dan kehancuran dalam rumah tangga.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum *kafa'ah* dalam perkawinan, antara lain:

- 1) Tidak dijadikan pertimbangan dalam melangsungkan perkawinan. Muslim manapun, selama bukan pezina berhak menikah dengan muslimah manapun (Ibnu Hazm);
- 2) Unsur *istiqamah* dalam menjalankan ajaran agama dan akhlak. Unsur-unsur lainnya, seperti kekayaan, keturunan, dan sebagainya tidak dijadikan pertimbangan (Madzhab Malikiyah);
- 3) Tidak hanya terbatas pada *istiqamah* dan akhlak, tetapi juga *kafa'ah* dalam unsur *nasab*, kemerdekaan, usaha, kekayaan, dan sejahtera dari aib (Jumhur Ulama).

b. Mahar

Mahar (mas kawin) ialah suatu pemberian dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada saat terjadinya perkawinan. Pemberian mahar ini hukumnya wajib bagi laki-laki, namun mahar pada prinsipnya bukan merupakan syarat dan rukun dalam perkawinan. Mahar dibayar oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang didasarkan pada kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan 31 KHI.

Mahar dalam suatu perkawinan mempunyai kedudukan penting, karena dianjurkan oleh agama dan

juga merupakan suatu tanda kesungguhan, serta penghargaan dari calon suami kepada calon isteri. Namun perlu dipahami bahwa pemberian mahar tersebut tidak berarti calon suami telah “membeli” calon isteri. Karena sebesar apa-pun nilai mahar tetap tidak dapat disetarakan dengan harkat dan martabat seseorang muslim.

Pemberian mahar oleh calon suami kepada calon isteri tidak didasarkan pada besar atau kecil jumlahnya, akan tetapi diukur berdasarkan nilai yang terkandung dalam pemberian mahar tersebut. Karena itu, Islam menyerahkan masalah tersebut kepada masing-masing sesuai dengan kemampuan dan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat.

Mahar boleh berupa emas, perlengkapan shalat, *al-qur'an*, sepasang sandal dan lain sebagainya, dan bahkan mahar yang berupa non-materi, seperti “pengajaran *al-quran*”. Karena yang terpenting adalah telah disepakati.

c. ***Walimah***

Walimah berarti berkumpul, karena pada waktu itu suami dan istri berkumpul. Sedang menurut istilah ialah khusus tentang makan dalam upacara perkawinan. Hukum menyelenggarakan *walimah* adalah *sunah muakadah*,

Sekalipun hukum *walimah* adalah sunnah, namun bila ada kemampuan sangat penting untuk diadakan, sebab acara *walimah* tersebut mengandung maksud dan tujuan mulia. Selain sebagai wujud rasa syukur dan kenikmatan

yang telah Allah SWT berikan, sekaligus merupakan sarana untuk memberitahukan kepada khalayak bahwa sepasang laki-laki dan perempuan tersebut telah menjadi suami istri, sehingga kemungkinan adanya fitnah dapat dihindari.

5. Perjanjian pra-nikah

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- a. **Taklik-talak** ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang (Pasal 1 KHI). Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dengan ketentuan:
 - 1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam;
 - 2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya tidak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan agama;
 - 3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.
- b. Sementara pada saat sesudah akad nikah yang dinyatakan oleh suami dalam taklik. Intinya taklik atas istri saya itu, sebagai berikut:

1) Sewaktu-waktu saya:

- Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
- Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- Atau saya menyakiti badan/ jasmani istri saya;
- Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukannya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan, serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.

6. Perkawinan sebagai kebutuhan manusia

Perkawinan didasarkan pada kebutuhan manusia baik secara fisiologis, psikologis, sosial, religi dan biologis. Perkawinan sebagaimana yang telah diatur hukum agama maupun hukum negara pada dasarnya merupakan proses kehidupan yang penting bagi kehidupan manusia.

Pertama, pemenuhan kebutuhan fisiologis. Manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri dan dorongan seksual yang perlu dipenuhi dengan rasa cinta dan sayang yang tumbuh pada makhluk lawan jenis yang merupakan suatu fitrah kemanusiaan, sekaligus ekspresi adanya naluri

seks. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tentunya harus dilakukan sesuai dengan aturan dan adab, karenanya perkawinan menjadi kebutuhan terbaik bagi manusia untuk memenuhi hal tersebut.

Kedua, pemenuhan kebutuhan psikologis. Perkawinan merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hal keinginan untuk dilindungi, rasa aman, cinta dan kasih sayang. Perkawinan merupakan ikatan antara suami atau isteri yang didasari rasa sayang, cinta dan saling pengertian. Pasangan hidup juga merupakan tempat curahan hidup yang secara otomatis memenuhi kebutuhan manusia secara psikis.

Ketiga, pemenuhan kebutuhan manusia secara sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Ikatan pernikahan membuat antara suami dan isteri membangun relasi yang baik dan saling melengkapi untuk memenuhi diri sebagai makhluk sosial. Secara berbeda perkawinan merupakan sebuah tuntutan dari masyarakat tertentu, sehingga mereka yang sudah layak umur harus menikah dan membangun rumah tangga.

Keempat, perkawinan merupakana kebutuhan religi. Perkawinan merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Secara umum semua agama membolehkan pengikutnya untuk menikah, dan semua agama mempunyai aturan serta tuntunan hidup ber-rumah tangga yang baik. Islam sendiri, mengajarkan dan mensyariatkan pernikahan sebagai sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan sebagai seorang muslim.

Kelima, perkawinan sebagai sarana penyaluran kebutuhan biologis yang dihalalkan dan menjadi penutup untuk melakukan zina sebagaimana banyak terjadi dewasa ini. Perkawinan juga memberikan rasa aman, bahagia, dan ketenangan dari pada memilih hidup tanpa menikah. Hawari menyebutkan seseorang yang memilih hidup bersama tanpa menikah, sebenarnya tidak menjalankan pola hidup yang selaras dengan kesehatan jiwa, apalagi agama dan moral. Mereka menganggap tidak penting lagi ikatan perkawinan yang membawa nama agama dan konsekuensi yang harus dijalani.

7. Adab jima'

Dalam persoalan hubungan suami istri, Islam menggariskan beberapa *adab jima'* yang harus diperhatikan supaya diridhoi Allah S.W.T.

a. Adab sebelum *Jima'*

- 1) Pastikan isteri dalam keadaan suci (tidak haid atau belum mandi haid atau *nifas*).
- 2) Mengenakan wewangian yang menarik bagi pasangan.
- 3) Saling merayu dan bermesraan sebagai pendahuluan, supaya tidak mengganggu kenikmatan, terutama bagi sang isteri.

b. Adab saat *Jima'*

- 1) Menggunakan penutup saat berhubungan badan, agar tidak seperti hewan;
- 2) Membaca doa sebelum memulai, hal ini sangat penting karena jika seseorang tidak berdoa saat berhubungan badan, maka setan pasti mencampuri keturunannya.

Bahkan menurut para ulama, jika seseorang tidak membaca doa saat berhubungan, maka jin/ setan ikut menikmatinya;

- 3) Tidak berkata-kata kecuali seperlunya;
- 4) Suami harus mampu melayani istri sebaik mungkin. Tidak boleh egois untuk mencapai puncak kenikmatan sendiri tanpa memikirkan istri. Suami harus menciptakan kebersamaan dalam pencapaian orgasme. Suami harus melayani isteri hingga mencapai puncak kenikmatan isteri bila ia terlambat.
- 5) Tidak segera melepas diri, menunggu suasana *anti klimaks* selesai mereda.

c. Adab setelah jima'

- 1) Peluklah istri setelah berhubungan, jangan langsung ditinggal sendiri.
- 2) Berbincang kecil selepas berhubungan, sambil menunggu keadaan istri segar kembali.
- 3) Bagi mereka yang menghendaki lagi, hendaklah ia mencuci kelamin dan berwudhu tanpa mandi *junub* terlebih dulu.
- 4) Segeralah mandi *junub* agar keadaan badan suci dan sehat kembali.

8. Etika dalam menjaga keseimbangan rumah tangga

- a. Berakhlak baik kepada pasangan dan bersabar menghadapi permasalahan.
- b. Saling meningkatkan kesabaran.
- c. Tidak memaksakan kehendak.
- d. Tidak saling cemburu berlebihan.

- e. Memberi nafkah sesuai kemampuan dan kebutuhan.
- f. Hendaknya belajar tentang kesehatan reproduksi dan hukumnya.
- g. Berlaku baik dan adil pada pasangan.
- h. Memelihara cinta kasih dan kasih sayang.
- i. Saling membimbing dan melindungi.
- j. Tidak berbuat aniaya terhadap pasangan.
- k. Saling menjaga agar terhindar dari sumber yang haram.
- l. Saling menghargai.

9. Larangan perkawinan

Islam melarang melakukan perkawinan yang akan merugikan bagi kedua belah pihak, jenisnya adalah:

- a. **Nikah *mut'ah*** artinya nikah untuk waktu tertentu. Nikah *mut'ah* ialah suatu bentuk pernikahan yang diniatkan dan diadakan untuk bersenang-senang. Nikah *mut'ah* dilarang, karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan sebuah pernikahan.
- b. **Nikah *syighar*** ialah suatu pernikahan berdasarkan pertukaran. Ulama berpendapat bahwa pernikahan *syighar* dilarang dan batal hukumnya apabila terjadi pernikahan.
- c. **Pernikahan *muhallil*** ialah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang sudah ditalak tiga (*ba'in*) dengan maksud agar mantan suaminya yang mentalak tiga dapat nikah kembali dengan perempuan tersebut setelah diceraikan oleh suaminya yang baru yang masa *iddah*-nya telah habis. Pernikahan tersebut menjadikan mantan suami yang

mentalak tiga, halal menikah kembali dengan mantan istrinya. Suami yang telah mentalak tiga disebut *muhallal lahu* (orang yang dihalalkan untuknya).

d. Menikahi perempuan berzina. Perempuan yang hamil lantaran perzinaan boleh dinikahi oleh laki-laki yang berzina dengannya atau laki-laki pezina lainnya. Laki-laki yang berzina boleh nikah dengan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik. Demikian pula sebaliknya, perempuan yang berzina boleh dinikahi oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik.

e. Perkawinan *khadn*. Orang Arab Jahiliyah berkata: “Kalau tidak diketahui orang tidak apa-apa dan yang tercela apabila diketahui orang.” Jenis perkawinan ini lebih dikenal dengan istilah “gundik” Perkawinan seperti ini yang dilarang Allah SWT.

10. Larangan *nusyuz* dalam perkawinan

Nusyuz berarti membangkang atau tidak taat pada perintah. Masyarakat memahami *nusyuz* sebagai pembangkangan istri terhadap suami dan tidak sebaliknya. Pandangan ini sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) KHI menyatakan bahwa: “Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya, kecuali dengan alasan yang sah”

11. Larangan diskriminasi dan kekerasan

Sesuai dengan tujuan perkawinan *sakinah, mawaddah, warahmah*, maka dilarang terjadi diskriminasi dan kekerasan diantara pasangan, orangtua terhadap anak dan orang lain yang berada di lingkup rumah tangga.

Selama ini diskriminasi dan kekerasan terhadap pasangan dan orangtua terhadap anak seringkali tidak terungkap, karena dianggap aib keluarga. Namun, sejak tahun 2004 negara telah membuat dan memberlakukan secara nasional Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga, baik oleh suami maupun oleh istri. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan.

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan dan pelakunya adalah suami. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pekerja rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Dalam perkembangan hukum, Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). UU PTPPO ini dibuat setelah ada komitmen

Indonesia atas penandatanganan protokol PBB tahun 2000 untuk mencegah, menanggulangi dan menghukum *trafiking* (perdagangan) terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak-anak.

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan. Penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penjeratan utang, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban, tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain. untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun imateril.

C. Rangkuman

Selain membawa banyak manfaat, secara fitrah manusia memang telah memiliki jodoh yang akan menjadi pasangan hidupnya, sebagaimana yang telah ditetapkan pada awal penciptaan manusia. Anjuran untuk menikah diprioritaskan bagi

mereka yang telah cukup usia dan matang secara psikologis. Menikah juga menjadi wajib bagi mereka yang sudah tidak mampu menahan hasrat, sehingga harus disalurkan dengan cara yang santun dan beradab sesuai tuntutan agama dan mengikuti hukum negara.

Dalam sebuah perkawinan, Islam menegaskan agar suami mempergauli istrinya dengan sikap yang baik sesuai dengan tuntutan kejiwaan dan keindahan dalam hidup. Juga dianjurkan untuk menjaga keharmonisan seksual dan pemenuhan naluri antara suami-istri, agar ikatan perkawinan semakin erat.

Islam juga menganjurkan kepada suami agar mencoba segala teknik dan cara yang dapat menimbulkan kepuasan pihak isteri, sehingga sang isteri dapat lebih mencintainya. Sebaliknya, isteri harus berusaha mengikat diri sang suami. serta mengajaknya untuk memenuhi seluruh dorongan kecintaan dan kenikmatan pada dirinya melalui cara-cara dan teknik tersebut.

Islam juga menghimbau suami agar tetap menjaga penampilan dirinya dan berusaha menarik perhatian isterinya, memenuhi keinginan seksualnya, bersenda gurau dengannya, dan merangsang naluri seksual sebelum melakukan senggama untuk mencapai puncak kenikmatan bersama dan memenuhi kebutuhan biologisnya. Istri adalah pembawa keseimbangan dalam kenikmatan seksual, bukan sekedar sarana pemenuh naluri seksual suami.

D. Evaluasi

1. Hak dan kewajiban suami istri yang termaktub dalam pasal 30 dan 31 ayat 1 UU Perkawinan, adalah ...

2. “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia memberi bantuan lahir dan batin”
Petikan pernyataan tersebut tercantum pada pasal..... UU Perkawinan.
3. Khusus untuk warganegara yang beragama Islam, hak dan kewajiban suami istri tercantum dan diatur dalam Pasal dan Pasal.....KHI.
4. Pasal 79 KHI mengatur tentang....
5. 3 (tiga) kewajiban orangtua terhadap anak yang utama menurut Islam, adalah